

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN GUNUNG JATI KOTA KENDARI

¹ Chika Zafa Librasti, ² Muhammad Basri, ³ Aminuddin

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Halu Oleo

chikazafa@gmail.com, muhammadbasri275@gmail.com, aminuddinifisip@gmail.com
Kota Kendari, 93125, Indonesia

Abstract

The problem of this research is how the implementation of the certification program PTSL in the village of Gunung Jati, Kendari and factors affecting the implementation of the certification program PTSL in the village of Gunung Jati, Kendari. The purpose of this study is to investigate the implementation of a certification program PTSL in the village of Gunung Jati, Kendari and factors affecting the implementation of the certification program PTSL in the village of Gunung Jati, Kendari. The method used in this research is descriptive qualitative. Data obtained using literature studies, field studies, and interviews. The results showed that the implementation of the certification program PTSL in the village of Gunung Jati, Kendari through the stages of counseling, data collection, measurement, adjukasi committee hearings, announcement and endorsement, as well as the issuance of the certificate has been running well and are in accordance with the terms and conditions determined. However, in the implementation of PTSL there are factors that affect the implementation, namely: communication factors, human resources, and the structure of the bureaucracy as the factors that most influence. Meanwhile, the disposition factors or characteristics of the factors most implementor as little influence.

**Keywords: : Certification; Implementation; Program
Abstrak**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari dan faktor yang mempengaruhi implementasi program sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari dan faktor yang mempengaruhi implementasi program sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari melalui tahapan penyuluhan, pendataan, pengukuran, sidang panitia adjukasi, pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertifikat sudah berjalan baik dan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam implementasi program PTSL terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, yaitu: faktor komunikasi, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang paling besar pengaruhnya. Sedangkan, faktor disposisi atau karakteristik implementor sebagai faktor yang paling kecil pengaruhnya

Kata Kunci: Implementasi; Program; Sertifikasi

Received: DD/MM/YY; Revised: DD/MM/YY; Accepted: DD/MM/YY

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu tanah, maka Pemerintah Republik Indonesia membuat sebuah kebijakan Proyek Nasional Agraria (Prona), Sekarang berganti nama menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan program sertifikat gratis dari BPN kepada masyarakat. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai dijalankan pada tahun 2018. Program ini ditangani langsung oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting karena pertama, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilik tanah. Kedua, pemberian sertifikat dimaksud untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, serta mempunyai nilai ekonomi.

Pada tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, menyiapkan sebanyak 2.050 sertifikat tanah milik warga, yang akan diserahkan secara simbolik oleh Presiden Jokowi pertengahan November 2018. Selain milik warga, pembuatan sertifikat tanah PTSL itu, merupakan tanah milik keagamaan, seperti Masjid dan Gereja. Wilayah Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari mendapat jatah sertifikat sebanyak 150 pada tahun 2018. Pada saat penerbitan sebanyak 150 sertifikat yang keluar. Dapat dilihat dari target yang dicapai bahwa minat warga Kelurahan Gunung Jati untuk mendaftarkan tanahnya cukup tinggi. Walaupun minat cukup tinggi, masih ada juga beberapa kendala yang muncul dalam implementasi program tersebut Ini bisa menjadi persoalan yang cukup serius karena bisa mempengaruhi target yang ingin dicapai, seperti: warga yang tidak memiliki kelengkapan surat tanah, surat tanah yang sudah lama dan tidak sesuai syarat, batas wilayah yang tidak jelas, dan lambatnya respon masyarakat, pengurusan kelengkapan surat yang berbelit-belit, kurangnya sosialisasi mengenai program PTSL, dan adanya biaya yang dipungut dalam pengurusan. Dengan adanya persoalan ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: "Implementasi Program Sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari".

Tinjauan Pustaka

Implementasi Program

Menurut Hanifah Harsono (2002: 67), implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program. Sedangkan, Westra (1989: 236) mengatakan bahwa "program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang

akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya". Berdasarkan definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi program merupakan proses pelaksanaan rumusan kebijakan berdasarkan petunjuk atau cara pelaksanaannya.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program

Berikut ini adalah beberapa teori mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Teori George Edward III (1980)

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III (Dwiyanto, 2017: 31), ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Berikut ada 4 faktor variabel tersebut yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Model Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab : 2004), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

3. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu: (1) Variabel Independen; (2) Variabel Intervening; dan (3) Variabel Dependen.

Grindle (1980) mendekati implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif umum yang perlu diperiksa sampai level program yang spesifik. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari kapasitasnya untuk menjalankan program sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi kebijakan secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (dalam Elwan.L.O.M, 2011:22). Pengukuran kesesuaian ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a) Dilihat dari prosesnya, yakni yang dapat diperiksa pada tingkat program yang spesifik dan dana yang dialokasikan, serta
- b) Dilihat dari hasil yang dicapai oleh implementasinya kebijakan tersebut.

Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, dan

b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran terhadap perubahan yang terjadi.

Lebih lanjut, menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (*implementability*) dari kebijakan tersebut. Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*contexs of policy implementation*).

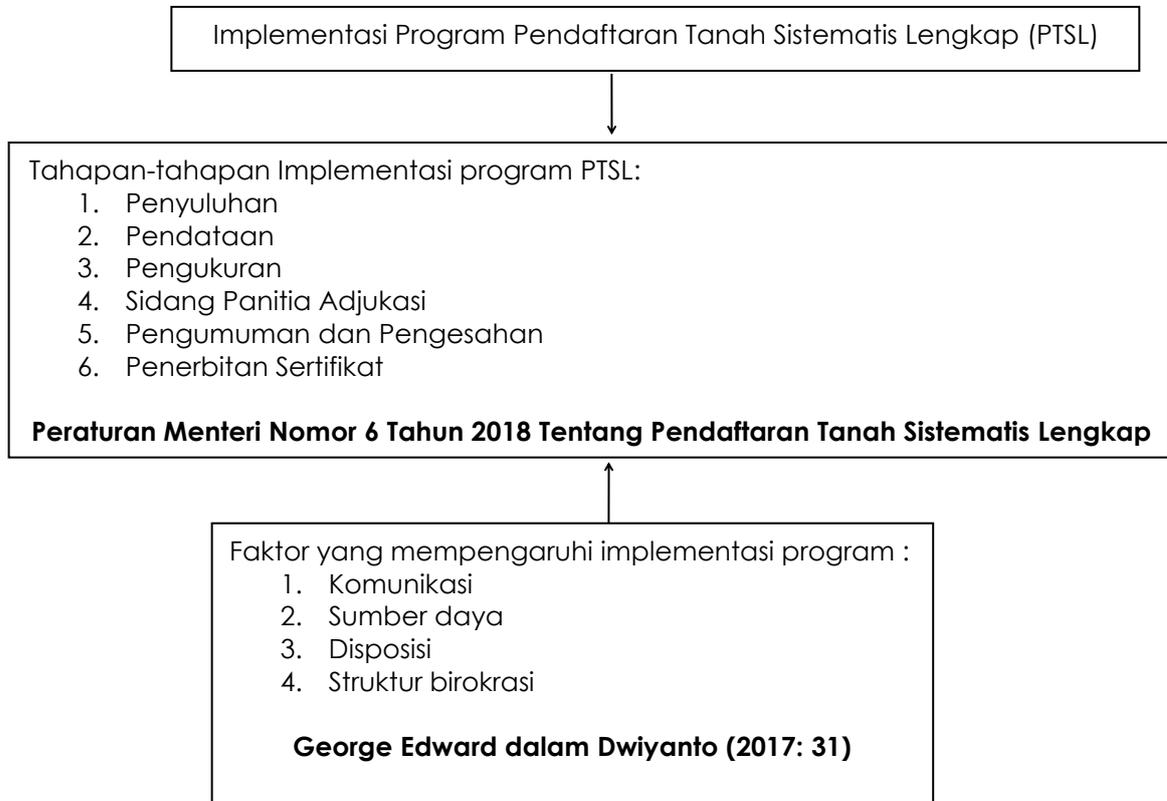
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Metode PTSL merupakan inovasi pemerintah melalui kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan dan papan. Tujuan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Tahapan Implementasi PTSL

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan, yaitu: Penyuluhan, Pendataan, Pengukuran, Sidang Panitia Adjudikasi, Pengumuman dan Pengesahan, dan Penerbitan Sertifikat.

Gambar 1. Kerangka Pikir



METODOLOGI

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000: 3), adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Study*)
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), mengadakan penelitian langsung dilapangan dengan menggunakan metode :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara (*Interview*)
 - c. Studi Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dimana ada tiga jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam analisa kualitatif, yaitu:

1. Proses Reduksi Data, Merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan pemusatan perhatian terhadap temuan data di lapangan. Dalam tahap proses reduksi periset di tuntut untuk dapat menggolongkan, mencari tema-tema dan membuang data yang tidak diperlukan maka selanjutnya dapat di interpretasi.
2. Penyajian Data, Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses ini periset mencoba mengelompokkan hal-hal yang serupa sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan kemudian memberikan tipologi didalamnya.
3. Penarikan Kesimpulan, Merupakan pencarian makna-makna selama penelitian berlangsung dan menguji kebenaran data sehingga sesuai dengan validitas penelitian. Dalam penarikan kesimpulan merupakan bagian terpenting dimana periset melakukan cek ulang atau peninjauan ulang terhadap sumber-sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan-Tahapan Implementasi Program Sertifikasi (PTSL) di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari

1. Penyuluhan

Sebelum melakukan penyuluhan, Kepala BPN terlebih dahulu menetapkan lokasi pelaksanaan PTSL dalam hal ini Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari, kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak Kelurahan untuk mengadakan sosialisasi dan turun langsung guna mengetahui situasi yang sebenarnya dilapangan. Kegiatan ini wajib di ikuti oleh pihak BPN, Pihak Kelurahan, RW/RT, Tokoh masyarakat, dan Masyarakat Kelurahan Gunung Jati. Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Tahapan penyuluhan dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari sudah berjalan baik dan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

2. Pendataan

Pihak Kelurahan Gunung Jati di berikan tugas dari pihak BPN untuk mengumpulkan data-data dari calon penerima PTSL sesuai target yang ditetapkan sebanyak 150 bidang tanah. Data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis, yaitu: (1) Data Fisik berupa letak, ukuran, dan batas wilayah bidang tanah; (2) Data Yuridis berupa status hukum kepemilikan hak atas tanah. Setelah melakukan penyuluhan, selanjutnya masuk pada tahapan pendataan. Dalam pendataan terbagi menjadi dua jenis data yaitu data fisik dan data yuridis. Kelurahan terlebih dahulu melengkapi kedua

data tersebut sebelum di periksa oleh pihak BPN. Jadi, tahapan pendataan dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari sudah berjalan baik dengan adanya koordinasi dari pihak BPN dan pihak Kelurahan Gunung Jati.

3. Pengukuran

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan. Setelah data usulan dari pihak Kelurahan diterima oleh pihak BPN, Satgas Fisik atau Tim Pengukur BPN sebanyak 2 orang di tugaskan untuk turun lapangan dengan didampingi oleh Lurah, RW/RT, LPM, Babinsa, untuk melakukan pengukuran dan penanaman batas-batas wilayah pada setiap warga yang namanya sudah terdaftar. Tahapan pengukuran di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari sudah berjalan baik dengan melibatkan langsung Tim BPN, Lurah, LPM, dan pihak Kepolisian beserta masyarakat dalam hal ini pemilik bidangan.

4. Sidang Panitia Adjudasi

Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan. Banyak data dari warga Kelurahan Gunung Jati yang tidak lolos setelah dilakukan penelitian oleh tim Adjudikasi PTSL, seperti: penggunaan penguatan hak fisik yang tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini, perlu diperhatikan untuk menunjang pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari.

5. Pengumuman dan pengesahan

Rekapitulasi data fisik dan data yuridis warga Kelurahan Gunung Jati mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah dan sudah diteliti sebelumnya oleh Tim Adjudikasi PTSL, diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Adjudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan. Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama jangka waktu pengumuman. Jadi, dalam tahap pengumuman dan pengesahan dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari sudah berjalan baik dan memenuhi syarat yang ditetapkan sebelumnya karena semua pelaksana terlibat mulai dari Tim BPN maupun Tim di Kelurahan.

6. Penerbitan Sertifikat

Hak Milik atau Sertifikat warga Kelurahan Gunung Jati yang telah terdaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, maka diterbitkan

sertifikat hak atas tanah. Penandatanganan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat, meliputi: pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan lainnya. Jadi, untuk penerbitan sertifikat pengorganisasian dalam program PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari sudah berjalan baik dan sesuai target yang ditetapkan. Akan tetapi, masih terdapat hambatan atau kendala yang dapat mempengaruhi pencapaian target dari program PTSL.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Sertifikasi (PTSL) di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari

a. Komunikasi dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Gunung Jati

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi program PTSL. Komunikasi dapat memberikan kejelasan mengenai petunjuk dan perintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Faktor komunikasi dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari sangat penting untuk membantu jalannya koordinasi antara Tim BPN, Tim Kelurahan, dan masyarakat. Komunikasi yang terjalin dalam implementasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati sudah berjalan baik.

b. Sumber daya program PTSL di Kelurahan Gunung Jati

Faktor sumber daya yang ada dapat mendukung implementasi program, meliputi: Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. Sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia dan sumber daya finansial sangat penting untuk mendukung tugas dan fungsinya dari masing-masing implementor. Pada Kantor BPN kondisi pegawainya sudah cukup baik, akan tetapi untuk sisi kemampuan masih kurang. Begitupun Tim di Kelurahan Gunung Jati masih kekurangan ahli-ahli tertentu untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan program PTSL.

c. Disposisi dalam program PTSL di Kelurahan Gunung Jati

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Karakteristik seorang pelaksana program dapat menentukan hasil kerjanya. Akan tetapi, dalam program ini sudah ada ketentuan-ketentuan atau petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga para pelaksana wajib mengikuti petunjuk tersebut

dengan mengesampingkan karakter yang dimilikinya. Berdasarkan penjelasan dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai disposisi dalam program PTSL di Kelurahan Gunung Jati, dapat dilihat bahwa karakteristik pegawai/pelaksana baik dari Tim BPN maupun Tim Kelurahan sudah baik

d. Struktur birokrasi program PTSL di Kelurahan Gunung Jati

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Struktur birokrasi yang jelas dapat mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. Kemudian, penjelasan mengenai SOP atau petunjuk teknis harus dijelaskan secara detail. Jadi, pengorganisasian, struktur kewenangan, tugas dan fungsi dari masing-masing tim dalam pelaksanaan program PTSL sudah cukup baik. Tetapi, para pelaksana harus menghindari hal-hal diluar prosedur yang dapat mempengaruhi struktur birokrasi pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program Sertifikasi PTSL di kelurahan Gunung Jati Kota Kendari, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Implementasi program Sertifikasi PTSL di kelurahan Gunung Jati Kota Kendari sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan melalui 3 Menteri. Akan tetapi, masih terdapat beberapa masalah atau hambatan, yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pegawai/pelaksana program, keterbatasan teknologi dalam proses pelaksanaannya program PTSL. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa pelaksanaan program sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari mulai dari proses pengukuran sampai penerbitan sudah baik walaupun masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai syarat-syarat PTSL. Penerapan struktur, kewenangan, tugas dan fungsi sudah berjalan baik, tetapi perlu dievaluasi agar pencapaian tujuan program menjadi lebih baik.
2. Faktor yang paling besar pengaruhnya dalam implementasi program Sertifikasi PTSL di kelurahan Gunung Jati Kota Kendari, yaitu: faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor struktur birokrasi. Sedangkan, faktor yang paling kecil pengaruhnya dalam implementasi program Sertifikasi PTSL di kelurahan Gunung Jati Kota Kendari, yaitu faktor disposisi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Program Sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari, maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana yang terlibat dalam implementasi program Sertifikasi PTSL di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari perlu ditingkatkan, melalui pembinaan dan sosialisasi lebih mendalam agar program PTSL lebih dipahami.
2. Pihak pelaksana perlu mengelola teknologi informasi untuk menunjang keberhasilan implementasi program Sertifikasi PTSL di Kelurahan gunung jati Kota kendari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal.
- Akib, Dr. Haedar, M.Si. & Tarigan, Dr. Antonius. 2008. *ARTIKULASI KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. *Jurnal Kebijakan Publik*. Jakarta.
- Basrowi, dan Suwandi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bryson, John M. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial* (8th ed) Diterjemahkan oleh M. Miftahuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H. Maryono. 2010. *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*. Yogyakarta: Magnum pustaka.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Indonesia: Ghalia.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan: Jakarta.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Indiahono, Dwiyanto. 2017-cetakan I. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Edisi Ke-2 Revisi. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- La Ode Muhammad Elwan, S. (2011). Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010. Universitas Gadjah Mada.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widoyoko, E.P. 2015. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi/Tesis :

Taufik Imam Ashari. 2018. Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Lampung Selatan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Siti Prihatin Yulianti. 2008. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan (Studi Di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat). Program Studi Magister Kenotariatan. Semarang: Universitas Diponegoro.

Artikel Jurnal :

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm.72.

Hidayat, Asep, dkk. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BANDUNG. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.

Khairi, Alfi. "IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017." *JOM FISIP* Volume 5: Edisi II Juli-Desember 2018.

Mujiburohman, Dian Aries. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 1 (2018).

Pedoman Undang-Undang :

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/>

<http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/model-model-impementasi-kebijakan-05.html>

<http://kebijakanpublik12.blogspot.com/2012/03/proses-kebijakan-publik.html>